



Gerindra Pertanyakan Dana "Siluman" Rp 37 M

MANGUPURA - Fraksi Gerindra DPRD Badung menolak mengakui "dana siluman" sebesar Rp 37 miliar dalam RAPBD Badung. Fraksi Gerindra menilai anggaran Rp 37 miliar yang tiba-tiba muncul dalam RAPBD perlu diusut tuntas. Sekretaris Fraksi Gerindra Nyoman Sentana menyebut kemunculan dana tersebut tidak melalui proses yang benar. Wajar jika Sentana berpikir demikian.



Kalau dana itu (Rp 37 miliar) sampai lolos APBD 2016, Fraksi Gerindra akan berada di luar. Kami tidak ikut terlibat dalam penandatanganan APBD 2016,"

Nyoman Sentana, Sekretaris Fraksi Gerindra

Pasalnya, dana tersebut sebelumnya oleh seluruh anggota Dewan Badung disebut tanpa melalui pembahasan Kebijakan Umum APBD/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) 2016. Anggaran muncul tiba-tiba dalam RAPBD 2016. Bahkan, lanjut Sentana, jika dipaksakan masuk dalam APBD 2016, maka Fraksi Gerindra bersikeras menolak pengesahan APBD 2016 ■

► *Baca Gerindra... Hal 35*

Humas Sebut Sudah Prosedural

■ GERINDRA...

Sambungan dari hal 21

Anggota Komisi IV ini mengaku serius dalam memantau perkembangan APBD 2016. Gerindra mengancam akan memboikot APBD 2016. "Kalau dana itu (Rp 37 miliar) sampai lolos APBD 2016, Fraksi Gerindra akan berada di luar. Kami tidak ikut terlibat dalam penandatanganan APBD 2016," ancamnya.

Menurut Sentana, tidak ada dasar hukum penambahan anggaran secara tiba-tiba setelah pembahasan KUA/PPAS. Apalagi dana tersebut tidak diperuntukkan dana kebencanaan. Melainkan

untuk belanja dan pengadaan. Salah satunya pengadaan atau pembelian baju guru senilai Rp 3,8 miliar, serta mobil pemadam kebakaran Rp 14 miliar. "Ini anggaran untuk pengadaan barang yang harusnya terencana dan terprogram dengan baik. Ini anggaran bukan untuk dana kedaruratan bencana alam," sentil Sentana seraya mengatakan semua anggaran harus sesuai dengan proses yang benar.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Badung AA Gede Raka Yuda memberi tanggapan normatif Gung Raka mengatakan sejatinya semua telah melalui proses sesuai dengan

mekanisme. Pemkab Badung juga sudah merencanakan semua kebutuhan dana yang akan dianggarkan. "Intinya tidak ada masalah lagi. Semua sudah sesuai dengan proses dan persetujuan dewan," jelasnya.

Gung Raka menyebut anggaran yang ada dalam Rp 37 miliar itu juga sudah jelas peruntukannya. Selain untuk belanja atau pengadaan barang, anggaran juga untuk memperbaiki sejumlah gedung sekolah yang rusak. Dana tersebut juga digunakan untuk perbaikan jalan di Kecamatan Kuta. "Saya rasa semua sudah jelas dan transparan," pungkasnya. (san/pit)



Kelan Pertegas Tolak Reklamasi

Usai Dirobek, Dipasang Lagi

KELAN - Seolah tak pernah lelah, pasca baliho mereka dirobek orang tak dikenal beberapa waktu lalu, kini pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kedonganan - Kelan, di antaranya ST. Dharma Sentana, ST. Satria Budi Yowana, dan ST. Sandhi Wigraha kembali mendirikan baliho yang bertuliskan *Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa*. Baliho tersebut dipasang di pertigaan Pura Desa Kelan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung Sabtu (24/10).

Hal ini disampaikan I Ketut Nevo Prayogi, wakil ketua ST. Dharma Sentana, Kedonganan. Dalam penuturannya, Nevo panggilan akrabnya mengungkapkan perobekan baliho yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab tersebut tidak akan memadamkan semangat juang pemuda di Desa Kedonganan dan Kelan untuk menolak rencana reklamasi seluas 700 hektare di Teluk Benoa. "Kami memasang baliho karena kami semua sudah tahu dampak dari reklamasi itu bisa menenggelamkan kawasan rendah terutama kawasan pesisir. Seperti Kedonganan, Kelan, dan Jimbaran," ungkapnya.

Tempat pemasangan baliho yang strat-

egis, berada di Jalan By Pass Ngurah Rai, dua buah baliho berukuran 4x3 meter dan 3x1 meter di pasang menghadap ke timur. Sehingga memudahkan siapa pun pengguna jalan untuk melihat baliho tersebut.

Nevo menerangkan pendirian baliho tersebut sudah mendapatkan izin dari Jero Bendesa Adat Kelan, sehingga tidak ada permasalahan dengan keberadaan baliho tersebut. "Yang bermasalah itu pihak pro, mereka tidak suka adanya penolakan ■

► Baca Kelan... Hal 35



NYOMAN WIDIADNYANA/RADAR BALI

PANTANG MENYERAH : Baliho yang dirobek dipasang lagi di Kelan.

Dapat Izin dari Jero Bendesa Adat Kelan

■ **KELAN...**

Sambungan dari hal 21

padahal yang menolak adalah masyarakat yang terkena dampak jika reklamasi itu dilaksanakan, makanya mereka melakukan tindakan-tindakan konyol," sindir nya.

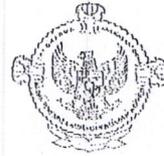
Rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektare mendapatkan penolakan dari sebagian besar masyarakat pesisir Teluk Benoa. Berdasarkan hasil survey di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa 64 persen masyarakat Kabupaten Badung tidak setuju dengan reklamasi Teluk

Benoa dan hanya 9 persen masyarakat Kabupaten Badung yang menyetujui reklamasi, sementara 27 persennya tidak menjawab. Dalam survei tersebut, responden usia produktif yang notabene membutuhkan lapangan pekerjaan justru menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Nevo berharap, pendirian baliho tersebut sebagai salah satu bentuk sikap tegas pemuda di Kedonganan dan Kelan. Juga jadi bagian dari perjuangan yang dilakukan masyarakat pesisir di Teluk Benoa. "Ini sikap kami sebagai masyarakat pesisir di Teluk Benoa, kami berharap Presiden Joko Widodo bisa membatalkan Perpres 51 Tahun 2014," pungkasnya. (ara/pit)

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31



Rp 288 Juta, Subsidi Gagal Panen

Dianggarkan Pemerintah untuk 2.000 Hektare

SINGARAJA - Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp 288 juta untuk mensubsidi dana asuransi gagal panen, bagi petani yang ada di Kabupaten Buleleng. Pada musim tanam kali ini, sedikitnya 2.000 hektare lahan akan diproteksi dengan asuransi gagal panen, sehingga kerugian yang ditanggung petani tak terlampau besar.

Sepanjang musim tanam 2015 ini, tak kurang dari 100 hektare lahan sawah basah mengalami gagal panen. Sebagian besar disebabkan kesulitan mendapatkan suplai air. Apalagi musim kemarau panjang tengah melanda Kabupaten Buleleng.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistannak) Buleleng Nyoman Swatantra mengatakan, skema asuransi itu merupakan

“Kalau kerusakan lahan mereka di atas 75 persen, langsung diganti Rp 6 juta per hektare lahan. Jadi kerugian gagal panen petani bisa ditekan.”

NYOMAN SWATANTRA
Kadistannak Buleleng

arahan dari pemerintah pusat. Khusus untuk Kabupaten Buleleng, saat ini baru mendapatkan jatah 2.000 hektare lahan dari 10.788 hektare lahan basah yang ada di Buleleng.

“Kalau kerusakan lahan mereka di atas 75 persen, langsung diganti Rp 6 juta per hektare lahan. Jadi kerugian gagal panen petani bisa ditekan,” kata Swatantra yang dihubungi Minggu kemarin (25/10).

Swatantra menambahkan, perusahaan asuransi hanya meminta premi sebesar Rp 188 ribu per hektare lahan per musim tanam. Namun, petani hanya perlu membayar sebesar Rp 36 ribu per hektare lahan per musim tanam. Sisanya, premi sebesar Rp 144 ribu

sisanya, disubsidi pemerintah. “Tapi yang boleh mengikuti

program ini bukan petani besar. Maksimal hanya bisa mendaftarkan lahan seluas 2 hektare tidak bisa lebih. Kurang dari 1 hektare bisa, nanti preminya *kan* disesuaikan,” imbuhnya.

Ia mengakui jika saat ini lahan-lahan pertanian basah di Buleleng rentan dengan gagal

panen. Apalagi banyak lahan yang kini kesulitan air pada musim kemarau. Ditambah lagi beberapa lahan sawah di Kecamatan Sangsit, Sawan, dan Kubutambahan, rentan rusak terkena gelombang pasang air laut ketika musim hujan tiba. (eps/djo)

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal. : 33